

# Prabowo Mendapat Status Warga Negara Jordania

Jakarta, Kompas

Pemerintah Jordania secara resmi memutuskan menganugerahkan status kewarganegaraan kepada mantan Panglima Komando Cadangan Strategis AD (Pangkostrad) Letjen TNI (Purn) Prabowo Subianto Kusumo, melalui sebuah Dekrit Raja (Royal Decree). Pemberitaan tentang penganugerahan status warga negara itu dimuat di harian Jordania *Al-Ra'i* yang terbit di Amman, ibu kota Jordania, tanggal 12 Desember 1998. Berita itu sendiri baru diterima *Kompas*, Senin (21/12) malam.



Prabowo Subianto

Dalam terjemahan bebas, harian berbahasa Arab itu menyebutkan, "Sebuah Dekrit Raja juga dikeluarkan untuk menganugerahkan status kewarganegaraan Jordania kepada seorang warga negara Indonesia, Prabowo Subianto Kusumo."

Disebutkan, bersamaan dengan itu, Pemerintah Jordania juga memberikan status kewar-

ganegaraan Jordania kepada seorang warga Pakistan Mohammad Sajid Bashir, warga Irak Mahmoud Al-Mayyahi dengan istri Berwin Abed Al-Husseini, serta anak perempuannya Ala'a.

Pemerintah juga mengembalikannya status kewarganegaraan Jordania kepada Ne'emeh Khalil Hikmat Al-Shara'a, Awad Mandouri, dan Nihaya al-Za-

areer yang ingin kembali ke Jordania, negara asalnya. Sebaliknya, Pemerintah Jordania juga mengizinkan enam warganya

untuk melepaskan kewarganegaraan Jordania guna mendapatkan status kewarganegaraan Jerman.

Walau begitu, belum ada penjelasan lebih rinci tentang status kewarganegaraan Jordania yang kini dimiliki mantan Pangkostrad Letjen TNI (Purn) Prabowo Subianto tersebut. Sumber-sumber diplomatik di Jakarta yang dihubungi *Kompas* menyebutkan, ada kemungkinan, Prabowo mendapatkan anugerah status kewarganegaraan Jordania tersebut di sela-sela acara perjalanan Umrohnya beberapa waktu lalu.

"Mungkin, di sela-sela Umroh itu, Prabowo bertemu Raja Hussein dan menceritakan semua kejadian yang dialami di sini, sehingga Raja Hussein tergerak untuk menganugerahkan status kewarganegaraan kepadanya melalui sebuah Dekrit," kata sumber tersebut. (rie)

## Sultan HB X: Langkah Gus Dur tak Berkaitan dengan Deklarasi Ciganjur

Yogyakarta, Antara

Salah seorang penandatangan Deklarasi Ciganjur, Sultan Hamengku Buwono X, menilai, langkah Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur yang melakukan pertemuan dengan mantan Presiden Soeharto, tidak ada



Sultan HB X

hubungannya dengan kelompok deklarator Ciganjur.

Dimintai komentarnya di Yogyakarta, Senin (21/12), Sultan mengatakan, pertemuan dengan Soeharto menjadi hak Gus Dur sendiri, dan manuver itu menjadi tanggung jawab Gus Dur.

Gus Dur bertemu mantan Presiden Soeharto hari

Minggu dalam kaitan pembahasannya usulannya untuk pertemuan

Soeharto, Habibie, Wiranto dan dirinya dalam konteks penyelenggaraan dialog nasional.

"Masalah itu jangan dikaitkan dengan Ciganjur, dan jika semua dikaitkan dengan Ciganjur, maka bisa jadi saya tidak bisa bergerak apa-apa," ujarnya.

Tanya Gus Dur

Ditanya mengenai motivasi

Gus Dur bertemu Soeharto, Sultan mengatakan, masalahnya yang perlu dipertanyakan apakah urgensinya Gus Dur bertemu mantan orang nomor satu di Indonesia itu.

"Untuk itu, silakan tanya langsung kepada Gus Dur, sebab yang lebih mengetahui urgensinya adalah dia. Kalau saya, jelas tidak tahu yang dimaksud beliau dan saya tidak mau menilai Gus Dur," tandasnya. (\*)

## Disesalkan, Upaya Menyandera Marker

Jakarta, Kompas

Upaya menyandera Jamsheed Marker, Utusan Khusus Sekjen PBB untuk masalah Timor Timur, di Dili hari Minggu (20/12), disesalkan banyak pihak. Karena, aksi massa yang tergabung dalam Dewan Solidaritas

ganggu proses penyelesaian masalah secara menyeluruh.

Gubernur Soares melihat aksi demo itu sangat merusak citra Timtim di dunia internasional dan dapat mempersulit proses penyelesaian yang

bersama antarpantai yang bertikai, jauh lebih menghasilkan daripada pengerahan massa untuk menteror dan mengintimidasi orang lain, apalagi utusan PBB. Rektor Universitas Timor Ti

"Saya sangat gembira dengan kerja sama yang diberikan tokoh masyarakat Timtim itu," katanya.

Jakarta, Kompas

Rakyat terlarut pun keamanan pada hakikatnya duanya sama-sama militan tidak berguwan bagi penyelesaian sosial politik itu, keduanya Hal itu ditegaskan Pengurus

Dipe

Jakarta, Kompas

Setiap pemertanggung-tanggung tampek kekelikinya. Keadalah pembukan milikkutan. Oleh kuan yang juganah tidak ditanggung jaw

"Pemimpin bertanggungpun hanyalah karena keesadadak perlu bapada siapa pujelis PakarPembangunaadin Lopa, yapembedah bTabir Ilahi, dalam Perspkarya Quraisita, Senin (21/

Selain Lopadan peneliti dKomaruddin pembedah buShihab, adikShihab.

Lopa mengpun telah memimpin, mar memegang piarti mempuny sejajar dengapada kenyata mimpin yang menjadi Tuha Ia menekank

K